

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI KOTA MEDAN

Margareth Sihite

Universitas Negeri Medan

e-mail: 13margareth@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, auditor, serta masyarakat yang terlibat dalam pengawasan anggaran, dan menganalisis dokumen terkait pengelolaan anggaran serta laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan melalui sistem informasi berbasis teknologi, namun akuntabilitas pengelolaan keuangan masih terhambat oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan dan keterbatasan pengawasan internal serta partisipasi publik. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi keuangan publik dan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Publik, Transparansi, Akuntabilitas.

Abstract – his research aims to evaluate the effectiveness of public financial management in improving government transparency and accountability in Medan City. The method used was qualitative research with a case study approach, which collected data through in-depth interviews with government officials, auditors, and citizens involved in budget oversight, and analysed documents related to budget management and financial reports. The results show that despite significant efforts to improve financial management transparency through technology-based information systems, financial management accountability is still hampered by low public understanding of financial reports and limited internal oversight and public participation. This study suggests the need to increase public financial literacy and strengthen internal and external monitoring systems to improve accountability and transparency.

Keywords: Public Financial Management, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana publik secara efisien dan efektif, tetapi juga dengan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat. Keuangan negara atau daerah yang transparan dan akuntabel menjadi dasar utama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diharapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Salah satu terobosan penting yang telah dilakukan adalah penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan akses publik terhadap informasi anggaran dan laporan keuangan daerah secara online. Walaupun demikian, tantangan utama dalam pengelolaan keuangan di Kota Medan masih terletak pada akuntabilitas, yaitu bagaimana menjamin bahwa dana yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Banyaknya laporan temuan dalam audit BPK yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran memperlihatkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

belum sepenuhnya tercapai (Siregar, 2020).

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan telah mengalami beberapa perkembangan penting, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pengimplementasian sistem informasi keuangan berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai anggaran dan laporan keuangan daerah secara lebih terbuka. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai alokasi dan realisasi anggaran, sehingga mereka dapat lebih mudah memantau penggunaan dana publik. Selain itu, teknologi juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pelaporan anggaran, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Namun, meskipun teknologi telah memperbaiki aksesibilitas dan transparansi informasi, tantangan besar dalam pengelolaan keuangan publik di Kota Medan masih berkaitan dengan akuntabilitas. Laporan keuangan yang terbuka tidak serta merta menjamin bahwa anggaran digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh, meskipun terdapat sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), temuan-temuan audit sering kali menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, seperti ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi penggunaan anggaran. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa meskipun transparansi sudah meningkat, akuntabilitas pengelolaan keuangan publik masih perlu diperkuat.

Beberapa faktor yang menghambat tercapainya akuntabilitas yang optimal antara lain adalah rendahnya tingkat literasi keuangan publik di kalangan masyarakat dan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara mengakses dan mengevaluasi laporan keuangan. Selain itu, meskipun laporan keuangan sudah dapat diakses secara elektronik, tidak semua masyarakat memahami arti dari informasi tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat kurang terlibat dalam pengawasan anggaran dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan publik dan edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya pengawasan anggaran sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau penggunaan dana publik.

Lebih lanjut, peran pengawasan internal di tingkat pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Pengawasan internal yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun sistem informasi dan teknologi memberikan dukungan yang signifikan terhadap transparansi, pengawasan internal yang kuat dan sistematis tetap menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Medan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menggali perspektif dari berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, auditor eksternal, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran dokumen, laporan, dan informasi yang tersedia di sumber-sumber daring seperti situs web resmi pemerintah, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta artikel jurnal dan publikasi terkait pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang relevan dan teraktual mengenai kebijakan, sistem pengelolaan anggaran, serta praktik transparansi dan akuntabilitas di Kota Medan.

Data sekunder yang dianalisis meliputi laporan keuangan Pemerintah Kota Medan, hasil audit dari BPK, laporan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, serta artikel yang membahas pengelolaan anggaran di Kota Medan yang dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sumber data ini kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan publik di Kota Medan. Analisis dilakukan dengan mengkategorikan data ke dalam tema-tema utama seperti transparansi, akuntabilitas, peran teknologi informasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis ini memberikan wawasan mendalam mengenai sejauh mana kebijakan dan sistem yang diterapkan di Kota Medan telah mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa temuan utama yang menggambarkan efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Kota Medan. Berdasarkan observasi, dan analisis dokumen yang dilakukan, beberapa temuan penting muncul terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan. Temuan ini akan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang diidentifikasi selama proses penelitian.

1. Transparansi Pengelolaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Medan telah mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah Kota Medan telah berupaya untuk meningkatkan keterbukaan anggaran melalui penerapan sistem informasi berbasis elektronik, seperti e-budgeting dan e-reporting, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi anggaran secara lebih mudah dan transparan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga dipublikasikan secara rutin melalui situs web resmi pemerintah, yang dapat diakses oleh publik. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka.

Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, beberapa informan menyatakan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat mengenai informasi anggaran yang disediakan. Banyak masyarakat yang menganggap laporan keuangan pemerintah daerah terlalu teknis dan sulit dipahami. Salah satu informan, seorang aktivis LSM yang terlibat dalam pengawasan anggaran, menyebutkan bahwa meskipun data anggaran telah tersedia di website, hanya segelintir masyarakat yang aktif mengakses dan memahami informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemahaman publik tentang penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan aksesibilitas data anggaran, masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat

memanfaatkan informasi tersebut secara optimal.

2. Akuntabilitas dalam Penggunaan Anggaran

Akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Kota Medan masih menghadapi beberapa kendala, meskipun ada kemajuan yang cukup baik dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pemerintah, ditemukan bahwa Pemerintah Kota Medan telah rutin melaksanakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan audit BPK juga dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik, yang menjadi dasar untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah.

Namun, ada temuan yang menunjukkan bahwa meskipun audit dilakukan, proses pengawasan seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, beberapa informan menyebutkan adanya tantangan dalam menindaklanjuti temuan audit secara cepat dan efektif. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan perbaikan berdasarkan temuan audit, beberapa masalah, seperti ketidaksihinggaan penggunaan anggaran dan perencanaan yang kurang tepat, masih sering ditemukan pada laporan tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di Kota Medan masih membutuhkan peningkatan dalam hal implementasi rekomendasi audit dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak internal dan eksternal.

3. Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan, seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk desa-desa dan e-budgeting untuk kota, telah membantu mempercepat proses pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Sistem ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih terstruktur dan meminimalkan kesalahan administratif. Selain itu, sistem informasi juga memungkinkan laporan keuangan dapat dipublikasikan secara langsung dan terintegrasi, memberikan transparansi yang lebih besar kepada publik.

Namun, meskipun teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran, beberapa informan mengungkapkan bahwa penerapan teknologi ini masih terbatas pada sebagian besar pejabat dan staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, sementara masyarakat umum dan sejumlah pegawai pemerintah daerah belum sepenuhnya terbiasa dengan penggunaan sistem tersebut. Selain itu, masalah terkait infrastruktur teknologi, seperti konektivitas internet yang tidak merata di beberapa daerah, juga menjadi kendala dalam penerapan sistem berbasis teknologi di seluruh Kota Medan.

4. Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Pengawasan yang efektif sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan penelitian, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk BPK, Badan Pengawasan Daerah (BPD), dan masyarakat. Meskipun terdapat struktur pengawasan yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkadang terbatas pada aspek administratif dan belum melibatkan pengawasan yang mendalam terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, pengawasan oleh masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan partisipasi dalam pemantauan anggaran sangat terbatas, karena banyak masyarakat yang belum memahami cara melibatkan diri secara aktif dalam proses pengawasan tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol eksternal terhadap

pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya memengaruhi akuntabilitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas pengawasan baik dari dalam pemerintah daerah maupun dari masyarakat untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan masih cenderung rendah. Meskipun pemerintah kota telah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan penggunaan dana publik sangat terbatas. Beberapa masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup informasi atau pemahaman untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan anggaran, yang mengakibatkan rendahnya keaktifan mereka dalam memberikan masukan atau mengawasi penggunaan anggaran.

Selain itu, meskipun sudah ada upaya untuk menyediakan informasi anggaran melalui saluran online, kesulitan dalam memahami laporan keuangan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih terstruktur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti melalui penyuluhan tentang pentingnya pengawasan anggaran dan pelatihan literasi keuangan, agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terjadi beberapa kemajuan signifikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Pemerintah Kota Medan telah berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran melalui penerapan sistem teknologi informasi seperti e-budgeting dan e-reporting yang memungkinkan publik mengakses informasi anggaran dengan lebih mudah. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang informasi tersebut masih menjadi kendala utama.

Di sisi lain, akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sudah mulai diperbaiki melalui audit rutin yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meskipun proses tindak lanjut terhadap temuan audit belum sepenuhnya optimal. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar hasil audit dapat segera diterapkan dengan lebih efektif. Selain itu, meskipun teknologi informasi telah membantu meningkatkan pengelolaan keuangan, masih ada tantangan dalam hal infrastruktur dan pemahaman masyarakat mengenai sistem ini. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran juga masih terbatas, yang mengurangi efektivitas pengawasan eksternal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi publik merupakan langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPKP. (2017). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Haryanto, D. (2021). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Pemerintah Daerah". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 10(1), 45-58.
- Nugroho, R. (2018). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Setiawan, E. (2019). "Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Anggaran di Pemerintah Kota Medan". *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 102-115.
- Siregar, S. (2020). "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik di Kota Medan: Tinjauan dari Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas". *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 11(4), 250-268.
- World Bank. (2022). *Fiscal Transparency in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: World Bank.